



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Selasa, 27 Mei 2025



## RINGKASAN BERITA HARI INI

### Revisi Perbup Pembelajaran Luar Kelas Sedang Digodok

Fokus Batas Jarak dan  
Teknis Pelaksanaan

KOTA-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo tengah membahas revisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 29 Tahun 2021 terkait pelaksanaan pembelajaran di luar kelas atau Outdoor Learning (ODL). Fokus revisi kali ini meliputi ketentuan jarak dan aspek teknis pelaksanaan ODL.

Kepala Dispendikbud Sidoarjo, Tirto Adi, menyampaikan bahwa proses revisi Perbup masih berada dalam tahap kajian oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

"Pembahasannya sudah berjalan. Progresnya saat ini masih on going dan sedang dikaji oleh bagian hukum," ujarnya kepada Radar Sidoarjo, Senin (26/5).

Salah satu poin dalam Perbup tersebut mengatur batas maksimal jarak pelaksanaan ODL dari lokasi sekolah, yakni, TK maksimal 50 kilometer, SD maksimal 100 kilometer, dan SMP maksimal



Tirto Adi  
Kepala Dispendikbud  
Sidoarjo

400 kilometer.

Namun, Tirto belum dapat memastikan apakah batas jarak itu akan diubah atau tetap dipertahankan, karena revisi masih dalam tahap penyusunan awal.

"Draft revisinya masih dikaji dan belum sampai ke meja Pak Bupati," ungkapnya.

Sebelum diajukan ke Bupati Sidoarjo, Subandi, draf revisi Perbup akan dibahas secara menyeluruh bersama para pemangku kepentingan, seperti Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SD dan SMP,

● Ke Halaman 10



AHMAD REZA/JAWA POS

ALTERNATIF: Wahana kereta di Punden Mbah Retjo di Desa Ganggang Panjang, Tanggulangin, kemarin (26/5). Spot itu bisa jadi pilihan tempat ODL.

### Aturan Jarak Lokasi Outdoor Learning Dikaji Ulang

DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo tengah membahas revisi Peraturan Bupati (Perbup) tentang pembelajaran di luar kelas atau *outdoor learning* (ODL). Bagian yang akan dibahas yaitu jarak lokasi pelaksanaan ODL.

Kepala Dikbud Sidoarjo Tirto Adi mengatakan, progres dari pembahasan Perbup Nomor 29 Tahun 2021 kini masih dalam tahap kajian di bagian hukum Pemkab Sidoarjo. "Kami sedang proses pembahasan," ujarnya kemarin (26/5).

Dalam Perbup Nomor 29 Tahun 2021 terdapat aturan batas jarak maksimal lokasi ODL. Untuk jenjang TK dibatasi maksimal 50 kilometer dari sekolah. Untuk SD, maksimal 100 kilometer dan SMP maksimal 400 kilometer. "Peraturan jarak itu bisa jadi akan diubah, tapi belum ada kepastian bagaimana," katanya. (eza/uzi)

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undang  
Sekretariat DPRD Sidoarjo

## E-Sport Sidoarjo Cari Atlet Handal untuk Porprov IX Jatim

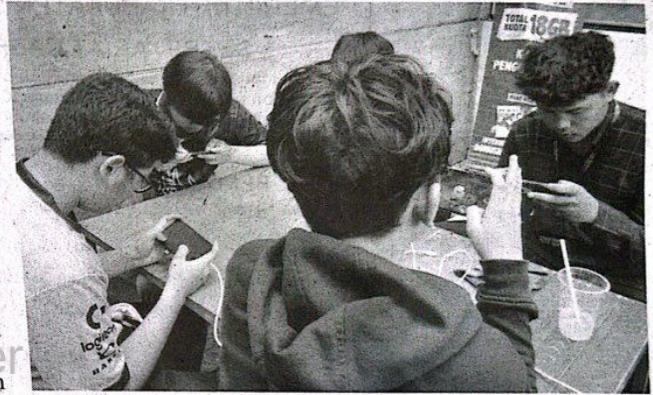
Sidoarjo, Bhirawa

Cabor e-sport Sidoarjo Minggu (25/5) akhir pekan lalu, telah sukses menggelar seleksi atletnya untuk pertandingan eksibisi Porprov IX tahun 2025 di Malang raya.

Puluhan peserta ikut dalam seleksi tersebut. Mulai dari mekanik individu strategi tim dan simulasi pertandingan.

Ketua Pengkab E-sport Sport

Indonesia (ESI) Sidoarjo, Julius Ivan, menyampaikan seleksi yang telah dilakukan sebagai langkah awal untuk membawa nama Kabupaten Sidoarjo dalam Porprov IX yang akan digelar pada akhir Juni hingga awal Juli 2025 itu. "E-sport Sidoarjo memilih atlet-atlet yang jago, memiliki teknik, semangat dan disiplin tinggi untuk bisa meraih prestasi," kata Julius. [kus.wwn]



Seleksi atlet e-sport sport Sidoarjo untuk persiapan Porprov IX Jatim.

## Sidak RTLH di Desa Sebani Tarik, Komitmen Segera Perbaiki

**SIDOARJO** – Bupati Sidoarjo Subandi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah tak layak huni (RTLH) milik Mulyono (68), warga Desa Sebani, Kecamatan Tarik, pada Minggu (26/5/25). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi tempat tinggal warga yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.

Dalam sidaknya, Bupati Subandi melihat langsung kondisi rumah Mulyono yang memprihatinkan. Ia menyebutkan bahwa atap rumah dan kamar mandi tidak layak dan akan segera diperbaiki.

"Kita sidak rumah tak layak huni milik Pak Mulyono. Kita akan perbaiki mulai dari atap rumah, jamban, hingga atap kamar mandi yang tadi kita lihat belum ada. Jadi nanti biar lebih layak dan nyaman untuk digunakan," ujar Subandi.

Subandi juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui program perbaikan RTLH yang sudah berjalan di Kabupaten Sidoarjo. Langkah ini merupakan bagian dari upaya

peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selain perbaikan fisik rumah, Subandi turut memastikan bahwa Mulyono telah memiliki jaminan kesehatan. Ia bertanya langsung untuk memastikan warganya terlindungi dalam aspek kesehatan.

"BPJS sudah ada, nggih?" tanya Subandi.

"Sudah ada, kalau BPJS Kesehatan," jawab Mulyono singkat.

Dengan kepastian tersebut, Subandi berharap masyarakat seperti Mulyono tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga mendapat akses layanan kesehatan yang memadai.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan.

Saya sangat senang dan bahagia, dan ucapan terimakasih kepada Pemkab Sidoarjo, atas akan direnovasi rumahnya. Kemarin Bupati Sidoarjo juga sudah meninjau rumah saya," ucap Mulyono Senin (26/5/25). • Loe





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Trans Jatim Koridor VI Diluncurkan

**Gubernur Khofifah  
Hubungkan  
Sidoarjo-Mojokerto**

**Mojokerto - HARIAN BANGSA**  
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi publik yang terjangkau dan nyaman.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, didampingi Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono, secara resmi meluncurkan layanan Trans Jatim Koridor VI yang menghubungkan Terminal Porong Sidoarjo dengan Terminal Kertajaya Mojokerto.

"Alhamdulillah hari ini kita

kembali meluncurkan Trans Jatim, kali ini Koridor VI yang memberikan layanan masyarakat dari Terminal Kertajaya Kabupaten Mojokerto ke Porong," ujar Gubernur Khofifah dalam sambutannya.

Peluncuran ini sekaligus menjawab aspirasi masyarakat, khususnya para pekerja di kawasan industri Ngoro. "Beberapa kali mereka menyampaikan harapannya agar Trans Jatim bisa melayani area industri Ngoro, dan ini jawabannya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi masyarakat," lanjut Khofifah.

Trans Jatim Koridor VI menetapkan tarif sebesar Rp5.000. Namun, selama satu minggu pertama sejak peluncuran,

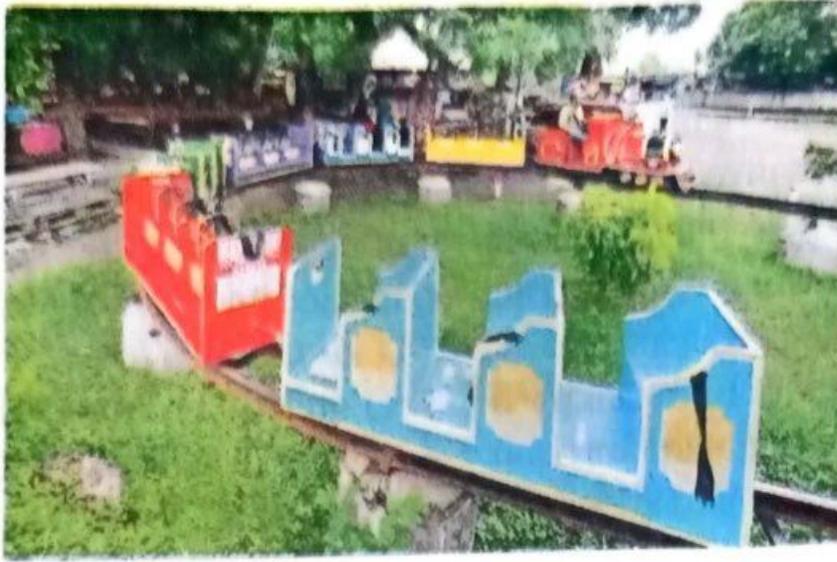


**Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, didampingi Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono, secara resmi meluncurkan layanan Trans Jatim Koridor VI.** (devi fitri atriyaniti)

masyarakat dapat menikmati layanan ini secara gratis. Selain itu, santri dan mahasiswa akan mendapat diskon 50 persen.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok rentan, Gubernur Khofifah juga mengumumkan bahwa pada Hari Lansia Nasional, 29 Mei, seluruh lansia akan digratiskan menggunakan Trans Jatim. Sementara itu, pada Hari Lahir Pancasila, 1 Juni, seluruh masyarakat bisa menggunakan layanan Trans Jatim secara gratis dari pukul 05.00 hingga 21.00 WIB.

Dengan peluncuran Koridor VI ini, diharapkan Trans Jatim semakin memperluas jangkauan dan memudahkan mobilitas masyarakat di Jawa Timur. (dev)



AHMAD REZA/JAWA POS

**ALTERNATIF:** Wahana kereta di Punden Mbah Retjo di Desa Ganggang Panjang, Tanggulangin, kemarin (26/5). Spot itu bisa jadi pilihan tempat ODL.

## Aturan Jarak Lokasi Outdoor Learning Dikaji Ulang

**DINAS** Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo tengah membahas revisi Peraturan Bupati (Perbup) tentang pembelajaran di luar kelas atau *outdoor learning* (ODL). Bagian yang akan dibahas yaitu jarak lokasi pelaksanaan ODL.

Kepala Dikbud Sidoarjo Tirto Adi mengatakan, progres dari pembahasan Perbup Nomor 29 Tahun 2021 kini masih dalam tahap kajian di bagian hukum Pemkab Sidoarjo. "Kami sedang proses pembahasan," ujarnya kemarin (26/5).

Dalam Perbup Nomor 29 Tahun 2021 terdapat aturan batas jarak maksimal lokasi ODL. Untuk jenjang TK dibatasi maksimal 50 kilometer dari sekolah. Untuk SD, maksimal 100 kilometer dan SMP maksimal 400 kilometer. "Peraturan jarak itu bisa jadi akan diubah, tapi belum ada kepastian bagaimana," katanya. (eza/uzi)

# Jawa Pos

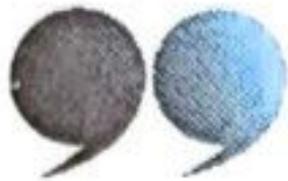


# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



## Disnaker Gelar Job Fair Hybrid Selama Dua Hari



Kami menggelar  
Job Fair Hybrid  
2025 selama dua  
hari pada 27-28  
Mei. Acara ini

terbuka bagi siapa  
saja. Sebanyak

saja. Sebanyak  
40 perusahaan  
akan turut ambil  
bagian. Sampai  
saat ini sudah ada  
1.000 pelamar.”

---

**AINUN AMALIA**

*Kepala Dinas Tenaga  
Kerja (Disnaker)*

*Sidoarjo bicara terkait  
bursa kerja di GOR*

*Delta Sidoarjo*

 Scanned with CamScanner

**Jawa Pos**

# Revisi Perbup Pembelajaran Luar Kelas Sedang Digodok

## Fokus Batas Jarak dan Teknis Pelaksanaan

KOTA-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo tengah membahas revisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 29 Tahun 2021 terkait pelaksanaan pembelajaran di luar kelas atau Outdoor Learning (ODL). Fokus revisi kali ini meliputi ketentuan jarak dan aspek teknis pelaksanaan ODL.

Kepala Dispendikbud Sidoarjo, Tirto Adi, menyampaikan bahwa proses revisi Perbup masih berada dalam tahap kajian oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

"Pembahasannya sudah berjalan. Progresnya saat ini masih on going dan sedang dikaji oleh bagian hukum," ujarnya kepada Radar Sidoarjo, Senin (26/5).

Salah satu poin dalam Perbup tersebut mengatur batas maksimal jarak pelaksanaan ODL dari lokasi sekolah, yakni, TK maksimal 50 kilometer, SD maksimal 100 kilometer, dan SMP maksimal



**Tirto Adi**  
Kepala Dispendikbud  
Sidoarjo

400 kilometer.

Namun, Tirto belum dapat memastikan apakah batas jarak itu akan diubah atau tetap dipertahankan, karena revisi masih dalam tahap penyusunan awal.

"Draft revisinya masih dikaji dan belum sampai ke meja Pak Bupati," ungkapnya.

Sebelum diajukan ke Bupati Sidoarjo, Subandi, draf revisi Perbup akan dibahas secara menyeluruh bersama para pemangku kepentingan, seperti Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SD dan SMP,

● Ke Halaman 10



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Revisi Perbup...

serta Bagian Hukum Pemkab Sidoarjo. "Biasanya rapat pembahasan usulan revisi ini dipimpin langsung oleh Asisten I," tambah Tirta.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa esensi dari ODL adalah memberikan pengalaman belajar langsung di lapangan. Dengan begitu, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga dapat melihat dan merasakan materi secara nyata.

Sebagai contoh, ia menyebut ke-

giatan ODL yang dilakukan SMPN 2 Sidoarjo dengan kunjungan ke Perumda Delta Tirta di Tawangsari, Taman Pintar Sedati, dan Masjid Agung Surabaya.

"Jaraknya memang tidak jauh, tetapi substansi pembelajaran tetap didapat. Itu yang penting dari ODL," terangnya.

Tirta juga menambahkan bahwa Kabupaten Sidoarjo sebenarnya memiliki sejumlah cagar budaya yang bisa dimanfaatkan untuk program ODL. Namun, menurutnya, sarana dan prasarana pendukung masih perlu diting-

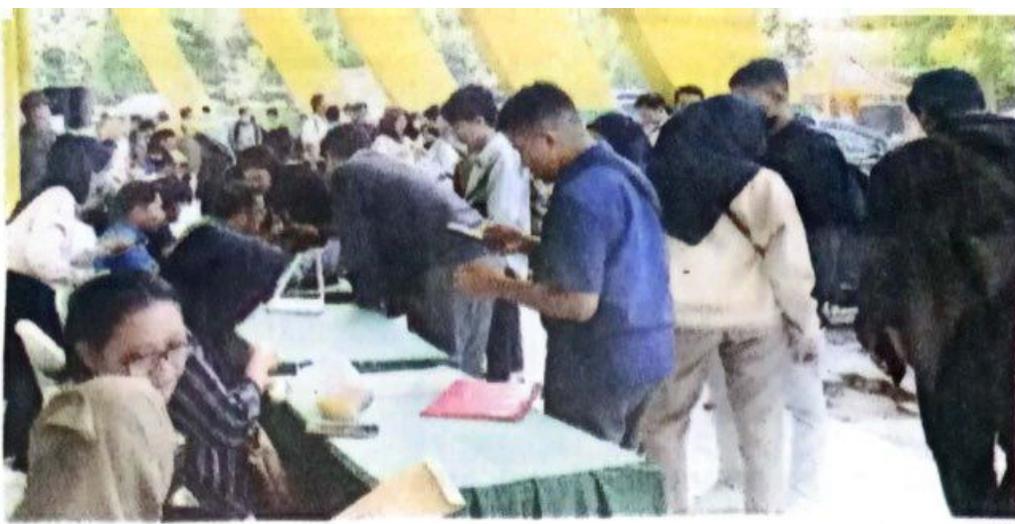
katkan agar kegiatan ODL bisa berjalan optimal.

"Potensinya ada, tinggal bagaimana kita menyiapkan dukungan fasilitasnya," pungkasnya. (sai/vga)

## Job Fair 2025 Digelar,...

"Silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Bawa berkas lengkap dan jangan sampai ada yang tertinggal. Semua lowongan di Job Fair ini gratis, tanpa dipungut biaya apapun," tegasnya. (sai/vga)





IST

**DIMINATI:** Pencari kerja saat memadati kegiatan Job Fair 2024 di GOR Sidoarjo.

# Job Fair 2025 Digelar, Disnaker Sediakan Ribuan Lowongan Kerja

KOTA-Kabar baik bagi para pencari kerja di Sidoarjo. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo akan menggelar Job Fair Hybrid 2025 pada 27–28 Mei 2025 di Gedung Serbaguna GOR Sidoarjo.

Sebanyak 40 perusahaan dipastikan ikut ambil bagian dalam kegiatan ini, dengan menyediakan lebih dari 1.000 lowongan kerja dari berbagai sektor.

Kepala Disnaker Sidoarjo, Ainun Amalia, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran di Kota Delta.

“Untuk pencari kerja, kegiatan ini masih terus berjalan. Insyaallah akan ada lebih dari 1.000 pendaftar,” ujarnya saat dihubungi Radar Sidoarjo

Senin (26/5).

Job Fair kali ini dikemas secara hybrid, di mana proses pendaftaran dilakukan secara online, sementara verifikasi berkas dilaksanakan langsung di lokasi saat pelaksanaan acara.

“Kegiatan ini terbuka untuk umum. Saya harap masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Pendaftaran dapat dilakukan secara daring mulai 25 hingga 28 Mei 2025 melalui laman resmi: [siapkerja.sidoarjo-kab.go.id](http://siapkerja.sidoarjo-kab.go.id).

Ainun juga mengimbau para pencari kerja untuk membawa dokumen lamaran secara lengkap saat datang ke lokasi. Ia menegaskan bahwa seluruh lowongan kerja yang tersedia tidak dipungut biaya.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

## Job Fair 2025 Digelar,...

“Silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Bawa berkas lengkap dan jangan sampai ada yang tertinggal. Semua lowongan di Job Fair ini gratis, tanpa dipungut biaya apa pun,” tegasnya. (sai/vga)

Scanned with CamScanner

### Demi Kualitas Bangunan Yang Baik, DPRD Sidoarjo Lakukan Pengawasan Ketat Rehab Gedung Sekolah Rusak Tahun 2025

by RadarJatim - 27 Mei 2025 in Politik

0



4

VIEWS



**SIDOARJO (RadarJatim.id)** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengalokasikan anggaran sekitar Rp 85 Miliar untuk melakukan perbaikan atau rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang mengalami kerusakan pada tahun 2025 ini.

Ada ratusan gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang mengalami kerusakan ringan, sedang ataupun parah di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Mulai dari plafon yang ambruk, atap bocor, dinding retak hingga kayu-kayu bangunan yang sudah lapuk karena dimakan rayap ataupun dimakan usia.

Sehingga ada beberapa sekolah yang terpaksa mengalihkan proses belajar mengajar ke gedung atau ruangan lainnya, seperti ruang koperasi, musholla, perpustakaan dan ruangan-ruangan lainnya.

Hal itu dilakukan oleh pihak sekolah atau dewan guru untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang bisa saja menimpa para peserta didiknya, apabila sewaktu-waktu ambruk karena kondisi bangunannya yang sudah rusak.

Banyaknya gedung SDN dan SMPN yang mengalami kerusakan itu membuat miris ditengah besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 ini, sekitar Rp 5,6 Miliar.





# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

Padahal dalam pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 aline 4 menyebutkan bahwa salah satu dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.



H. Choirul Hidayat, SH, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo.

H. Choirul Hidayat, SH, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi segenap bangsa Indonesia.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat selama proses pembangunan ataupun rehab gedung-gedung sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2025 ini.

“Salah satu dibentuknya Negara (Indonesia, red) ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, sesuai dengan fungsi kami sebagai anggota dewan, kami akan melakukan pengawasan selama proses pembangunan gedung-gedung tersebut. Agar kualitasnya baik, tahan lama serta anak-anak bisa belajar dengan tenang dan nyaman,” katanya.

Kualitas gedung sekolah yang baik, kuat dan tahan lama menjadi salah satu faktor penting dalam proses belajar mengajar selama di sekolah. Serta dapat meningkatkan konsentrasi belajar bagi anak-anak tanpa diselimuti rasa khawatir bahwa gedung itu akan bocor saat diterpa hujan ataupun ambruk karena dimakan usia dan bencana angin kencang.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menjelaskan bahwa pihaknya sudah berusaha mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk rehab gedung SDN dan SMPN rusak.

■ “Namun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya juga harus di cover oleh APBD kita, maka rehab gedung sekolah ini akan dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

■ Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo



H. Anang Siswandoko, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Hal senada juga disampaikan oleh H. Anang Siswandoko, ST, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo yang meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk mendahulukan perbaikan terhadap gedung-gedung sekolah yang mengalami kerusakan parah.

Sebab, anggaran sekitar Rp 85 Miliar itu dirasa belum bisa meng-cover perbaikan gedung-gedung sekolah rusak yang jumlahnya ratusan tersebut.

“Harus ada skala prioritas, dimana (gedung sekolah, red) yang mengalami kerusakan parah harus didahulukan,” sampainya.

Poitisu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dari Kecamatan Sidoarjo itu menegaskan bahwa prioritas pembangunan gedung-gedung sekolah yang mengalami rusak parah itu sangat penting.

Hal itu untuk menghindari terjadinya korban akibat atap, pilar-pilar ataupun gedung sekolah ambruk yang bisa saja menimpa para peserta belajar mengajar di sekolah tersebut. Baik siswa-siswi maupun dewan guru, bahkan masyarakat sekitarnya.

“OPD harus melakukan perencanaan yang baik, dengan mendahulukan gedung-gedung sekolah yang kerusakannya cukup parah. Jangan sampai ada korban, akibat tertimpa bangunan yang rusak tersebut,” tegasnya.



# INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO



Muh. Zakaria Dimas Pratama, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Muh. Zakaria Dimas Pratama, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo menambahkan bahwa kondisi sejumlah sekolah rusak, baik SDN maupun SMPN itu menjadi salah satu penyebab sekolah-sekolah milik pemerintah itu mulai ditinggalkan oleh masyarakat.

Para orang tua lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya ke swasta yang gedungnya lebih representatif, apabila dibandingkan dengan gedung-gedung sekolah milik pemerintah.

“Setelah saya mendapat laporan dari masyarakat dan sejumlah guru, kami mendatangi 3 SDN di wilayah Kecamatan Taman. Ternyata faktanya, ada beberapa bangunan ruang kelas yang sudah tidak layak ditempati untuk kegiatan belajar,” ujarnya.

Kondisi infrastruktur yang rusak, seperti plafon ambruk, dinding retak dan akses jalan menuju sekolah yang berlubang menjadi kendala serius bagi proses kegiatan belajar mengajar.

“Tak hanya membahayakan keselamatan siswa dan guru, situasi ini turut berdampak pada minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah negeri,” tambahnya.

Menurut Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Sidoarjo itu bahwa kondisi ini bertolak belakang dengan semangat pemerintah pusat yang tengah mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di berbagai pelosok daerah, termasuk di wilayah tertinggal.

“Pemerintah pusat tengah menyiapkan program Sekolah Rakyat untuk mengentaskan buta huruf dan mendukung pendidikan masyarakat kurang mampu. Jangan sampai program nasional ini justru tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah,” ungkapnya.

Maka dari itu, anggota DPRD Sidoarjo dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo 5 (Taman dan Sukodono) itu menegaskan bahwa harus ada kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif.

Dalam konteks penganggaran, anggota DPRD Sidoarjo telah menunjukkan komitmennya dengan mengarahkan sebagian anggaran Pokok Pikiran (Pokir) untuk perbaikan infrastruktur pendidikan.

“Banyak anggota DPRD Sidoarjo yang telah mengalokasikan anggaran Pokir untuk perbaikan sekolah, termasuk ruang kelas, toilet dan fasilitas penunjang lainnya. Ini bagian dari upaya legislatif untuk memperkuat sektor pendidikan,” paparnya.

“Pendidikan adalah fondasi utama untuk membangun masyarakat yang maju dan sejahtera. Infrastruktur sekolah harus menjadi prioritas bersama,” pungkas Dimas. ([adv/mams](#))

